



Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru

Nurul Azmi
Universitas Riau

Nur Laila Meilani
Universitas Riau

Korespondensi penulis: azminurul597@gmail.com

Abstract. *The existence of street vendors (PKL) is a social phenomenon that can be found in big cities. One of them is in Pekanbaru City, which is on Jalan Agus Salim. The traders who sell along Jalan Agus Salim have caused the city of Pekanbaru to become a city that is disobedient to regulations, traffic jams occur as a result of which the roads become narrower, and the environment along the roads becomes chaotic, dirty and far from healthy. The aim of this research is to determine the evaluation of the Agus Salim Market Street Vendor Arrangement Program by the Department of Trade and Industry in Pekanbaru City. This research uses Evaluation Theory according to Stufflebeam in Arikunto (2008), which uses four CIPP indicators, namely: Context, Input, Process, and Product. This type of research is qualitative research by providing an overview or descriptive problem in the form of a narrative. Collecting the necessary data, both primary data and secondary data, is collected through interviews, observation, documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from the existing research problem. The results of this research are evaluations which can be said to have not been optimal, because there are still inhibiting factors in its implementation, namely the lack of enthusiasm of traders to relocate and the lack of land provided for traders.*

Keywords: *Program Evaluation, Program Management, Program Implementation.*

Abstrak. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di kota-kota besar. Salah satunya di Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Agus Salim. Pedagang yang berjualan disepanjang jalan Agus Salim tersebut mengakibatkan kota pekanbaru menjadi kota yang tidak tertib pada aturan, terjadinya kemacetan akibatnya jalan semakin sempit, dan lingkungan disepanjang jalan tersebut menjadi semrawut, kumuh dan jauh dari kesan sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi menurut Stufflebeam dalam Arikunto (2008), yang menggunakan empat indikator CIPP, yaitu : Context, Input, Process, and Product. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memberikan gambaran atau deskriptif permasalahan yang berupa naratif. Pengumpulan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah Evaluasi yang dapat dikatakan belum maksimal, karena masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya antusias pedagang untuk direlokasikan dan kurangnya lahan yang disediakan untuk pedagang.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Program Penataan, Pelaksana Program.

LATAR BELAKANG

Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa sesuai dengan visi misi kota pekanbaru. Mewujudkan kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan merupakan sebuah pekerjaan yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah kota pekanbaru, karena menjadi pusat perdagangan mengandung arti bahwasanya kota pekanbaru harus memiliki kegiatan perdagangan yang

lebih maju diwilayah Sumatera, sehingga mampu menjadikan kota pekanbaru sebagai pusat kegiatan perdagangan. Oleh karena itu upaya untuk memajukan kegiatan perdagangan harus didukung dengan pelayanan yang prima, baik dari sector pemerintah maupun swasta serta dukungan dari masyarakat.

Dikota Pekanbaru pertumbuhan perdagangan sektor informal melaju dengan pesat, hal ini diakibatkan banyak dari masyarakat Kota Pekanbaru serta masyarakat pendatang yang memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima disebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan mencari nafkah untuk kepentingan hidup serta pertumbuhan perdagangan tidak seimbang dengan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima berjualan ditempat yang tidak diperuntukkan bagi pedagang.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Agus Salim Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dimana kondisi bahu jalan agus salim saat ini dipenuhi bangunan liar yang dipergunakan oleh pedagang untuk berjualan keperluan rumah tangga. Pedagang yang berjualan disepanjang jalan Agus Salim dari simpang jalan jenderal Sudirman sampai jembatan Sungai Sago berjumlah 353 pedagang. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Kota Pekanbaru menjadi kota yang tidak tertib pada aturan, terjadinya kemacetan akibat jalan semakin sempit, dan lingkungan disepanjang jalan tersebut menjadi sangat semrawut, kumuh dan jauh dari kesan sehat.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta dilapangan melalui beberapa informasi yang didapat dari beberapa narasumber antara lain kepala bidang pasar, pedagang pasar agus salim dan masyarakat sekitar pasar agus salim, ialah : *pertama* pasar agus salim masih belum tertata dengan baik karena terlihat masih banyak PKL yang berjualan didepan hingga pinggir-pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan setiap harinya , sehingga perlunya dilakukan revitalisasi yaitu dengan memberikan ruang bagi pedagang untuk berjualan ditempat dengan bangunan yang layak, kondisi ini jelas memperburuk pandangan konsumen terhadap pasar tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan yang mana seharusnya dapat digunakan untuk aktifitas lalu lintas yang mana juga digunakan untuk tempat parkir.

Akibatnya PKL masih enggan untuk menempati pasar alternatif tersebut. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan Pemerintah. Perencanaan kebijakan Pemerintah dalam penertiban PKL sepertinya belum memberikan solusi tepat dan belum berjalan optimal. Tampak kebijakan penertiban PKL dengan membangun pasar alternatif yang masih belum didukung sarana dan prasarana yang layak.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan program, realisasi yang telah dicapai, dampak yang ada serta dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari kebijakan tersebut. Evaluasi terhadap program tersebut dilakukan untuk mengetahui implikasi ekonomi yang terjadi setelah PKL direlokasi,

strategi yang diterapkan pedagang dalam mempertahankan maupun meningkatkan pendapatan setelah direlokasi.

Menjawab permasalahan diatas Arikunto menawarkan sebuah model evaluasi yang tepat digunakan, model itu adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) Evaluation model sebelumnya telah dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1967 dan telah banyak dipakai oleh para evaluator dalam mengevaluasi suatu program penataan pkl.

KAJIAN TEORITIS

1. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah studi sistematis yang dilakukan untuk menilai seberapa baik program bekerja dan memberi hasil yang lebih efektif dan efisien. Melalui evaluasi program, dapat membuat keputusan manajemen yang lebih baik, mendukung pendekatan baru dan inovatif dan praktek yang muncul. Evaluasi program dapat menilai kinerja program pada semua tahap perkembangan program. Kolaborasi adalah kunci untuk evaluasi program yang sukses (Suratman, 2017).

2. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagaimana dari komponen dan sub-komponen program yang belum terlaksana dan apa penyebabnya. (Arikunto & Jabar 2009:18). Kemudian menurut Tayibnapi (2008:9) tujuan dari evaluasi program ialah berguna bagi program itu sendiri dengan penggunaannya harus mengumpulkan informasi-informasi.

3. Evaluasi Model CIPP

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program pembelajaran. Salah satu model tersebut adalah evaluasi model CIPP (Context, Input, Process and Product) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam. Kemudian Stufflebeam mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan, menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem.

4. Tujuan Evaluasi CIPP

Menurut Wirawan, Tujuan dari evaluasi CIPP diantaranya, yaitu, Mengukur pengaruh program, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah program sesuai dengan standar, evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan, pengembangan staf program, memenuhi ketentuan undang-undang, akreditasi Program, mengukur anggaran setiap program, mengambil keputusan mengenai program.

5. Chek List dalam Model Evaluasi CIPP

Daniel Stufflebeam mengembangkan 9 check list sebagai panduan bagi evaluator dalam melaksanakan model evaluasi CIPP. Fungsi dari check list untuk membantu para evaluator mengevaluasi program yang secara relatif mempunyai tujuan jangka panjang. Pertama, check list agar evaluator dapat menyelesaikan laporan evaluasi tepat waktu, jadi membantu kelompok evaluator untuk merencanakan, melaksanakan layanan yang efektif kepada para penerima manfaat yang ditargetkan.

6. Kelebihan dan kekurangan Evaluasi Model CIPP

Selain memiliki kelebihan, model CIPP memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program penataan pedagang kaki lima dipasar agus salim tersebut sehingga mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tanpa adanya kombinasi. Hal ini dapat terjadi karena untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak yang akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

7. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

PKL (*street trading/street hawker*) adalah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Kecenderungan PKL berada pada lokasi strategis terkait dengan arah pergerakan orang dan terkait dengan sektor pelayanan perdagangan-jasa lainnya (pasar, mall/plaza, tempat mangkal kendaraan dan sebagainya). Pengadaan tempat khusus untuk PKL pada tempat-tempat strategis di pusat kota dengan sistem pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan permasalahan kota dan operasionalnya.

8. Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan Pedagang Kaki Lima

Menurut (Hasan Erliana, 2005). Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima ini dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Sehingga konsumen dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk semua barang harian. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat senantiasa dipandang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran atau deskriptif permasalahan penelitian yang berupa naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data dan studi mendalam dari orang dalam lingkungan alamiah atau lingkungan kerjanya (Miles, Huberman 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

a. Aspek Konteks

Dapat di evaluasi bahwa konteks yang digunakan dalam kebijakan ini khususnya penataan PKL dalam memaksimalkan pencapaian tujuan perencanaan kegiatan ini belum maksimal dapat dijalankan. Dengan adanya kebijakan ini belum sepenuhnya dapat membawa dampak positif bagi PKL. Dengan demikian pentingnya untuk meninjau ulang atau menemukan solusi dari masalah ini perlu dilakukan guna untuk memaksimalkan tercapainya tujuan dari perencanaan kebijakan ini. Karena jika hal ini dibiarkan maka PKL bisa dengan sengaja meninggalkan tempat yang telah ditetapkan dan kembali berdagang ditempat yang sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari pedagang sentra PKL juga mengeluhkan sepi pengunjung karena pasar rakyat ini terlalu sempit hal tersebut berakibat pada pendapatan pedagang. Kondisi tersebut juga mengakibatkan Pedagang Kaki Lima sebagian tidak mau menempati pasar yang disediakan. Selain itu juga banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak bisa menempati pasar yang disediakan dikarenakan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota pekanbaru.

b. Aspek Input

Bahwa dalam upaya evaluasi aspek input tidak sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa sarana yang diberikan tidak cukup memadai dan menimbulkan permasalahan dan penurunan pendapatan bagi PKL sendiri. Yang tadinya program ini diharapkan dapat menertibkan dan menimbulkan dampak baik bagi publik khususnya PKL namun juga sebaliknya. Akibatnya, PKL masih secara pelanggaran melakukan penjualan dan berdagang ditempat yang dilarang untuk berdagang. Pentingnya mengevaluasi sarana dan aspek objek lokasi pemindahan PKL ini dilakukan oleh pemerintah guna untuk memaksimalkan kegiatan dan kebijakan penataan yang telah direncanakan tanpa harus merugikan PKL.

c. Aspek Proses

Peneliti mengidentifikasi bahwa proses penataan pedagang kaki lima belum merata kepada semua PKL masih terdapat beberapa PKL yang tidak mendapatkan tempat berjualan dan sarana yang diberikan kurang kondusif sehingga masih banyaknya PKL yang masih belum pindah ketempat yang disediakan. Terlihat dari gambar diatas dapat dipahami bahwa masih sepi PKL yang berjualan disana hal tersebut diakibatkan oleh sarana dan prasarana dan lokasi yang kurang strategis yang dianggap PKL merugikan. Karena menurut PKL pendapatan mereka cenderung menurun dari tempat yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penataan ini tidak berjalan secara maksimal

dibuktikan dengan PKL yang tidak sepenuhnya pindah dari tempat yang dahulu ketempat yang disediakan oleh pemerintah.

d. Aspek Produk

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan PKL yang telah direncanakan oleh pemerintah telah berjalan. Namun, outputnya tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari respon dari PKL itu sendiri yang tidak bersedia pindah hal ini disebabkan fasilitas atau sarana yang disediakan tidak cukup memadai dan kondusif. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kebijakan penataan PKL di jalan. Agus salim ini perlu dievaluasi kembali karena belum berjalan secara maksimal.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim Di Kota Pekanbaru

a. Antusiasme Pedagang Untuk Direlokasi

Bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penataan dan penertiban adalah Antusiasme Pedagang Untuk Direlokasi kurang. Sehingga pihak Disperindag sendiri menjadi kewalahan dalam mengatasinya, karena yang memiliki wewenang dalam penertiban PKL tersebut adalah Satpol PP, untuk itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak satpol pp itu sendiri. Guna penertiban ini dilakukan untuk menghindari hal negative dan menggu kepentingan publik dalam hal ini pengguna jalan dalam keselamatan karena dengan adanya atau banyak PKL dipinggir jalan ini, memakan ruas jalan dan menimbulkan kemacetan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan kericuhan.

Dengan demikian data diketahui bahwa evaluasi yang bersifat mendorong PKL untuk lebih antusias dalam berpindah ketempat yang telah disediakan itu perlu dan harus dilakukan. Salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk PKL yang mana menjadi salah satu penghambat dalam PKL direlokasikan.

b. Ketersediaan Lahan

Kebijakan penataan PKL di jalan agus salim ini tidak berjalan secara maksimal dan perlu dilakukannya evaluasi, proses pelaksanaan yang belum maksimal mulai dari penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PKL ini hingga adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pentingnya dilakukan evaluasi dalam setiap aspek atau tahapan dalam sebuah kebijakan bukan hanya untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Namun, untuk menjadi pembanding dan pencari jalan keluar dan titik terang dalam upaya menjalankan kebijakan yang lebih maksimal dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Tidak maksimalnya proses kebijakan penataan PKL di jalan agus salim ini diakibatkan oleh adanya faktor yang menjadi

penghambat yaitu kurangnya antusias dari PKL untuk direlokasikan dan lahan yang disediakan tidak memadai.

KESIMPULAN

Evaluasi Program penataan pedagang kaki lima dikawasan jalan agus salim kota pekanbaru belum maksimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian berdasarkan empat indikator *pertama*, evaluasi konteks belum maksimal . hal ini dibuktikan dengan pencapaian tujuan perencanaan kegiatan ini belum maksimal dapat dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan PKL menurun akibat kebijakan ini. *kedua*, evaluasi input belum maksimal, hal ini dibuktikan dalam pemberian sarana dan prasana dalam penataan pedagang kaki lima ini belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan PKL yang menerangkan bahwa sarana yang diberikan kurang nyaman karena stand yang diberikan kecil dan licin. *ketiga*, evaluasi proses belum maksimal. Dibuktikan dengan proses penataan pedagang kaki lima tidak berjalan dengan maksimal dan merata kepada semua PKL masih terdapat beberapa PKL yang tidak mendapatkan tempat berjualan dan sarana yang diberikan kurang kondusif sehingga masih banyaknya PKL yang masih belum pindah ketempat yang disediakan. dan *keempat*, evaluasi produk belum maksimal dibuktikan dengan outputnya tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari respon dari PKL itu sendiri yang tidak bersedia pindah hal ini disebabkan fasilitas atau sarana yang disediakan tidak cukup memadai dan kondusif.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Hidayat(2018) *Evaluasi program revitalisasi pasar tradisional di pasar Sentiong Balaraja mas baru kabupaten tangerang*(Skripsi).Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media
- Arikunto, S. Jabar, C. F. A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Arlinda Miranti, Dyah Lituhayu(2012) *Evaluasi program penataan pedagang kaki lima di kabupaten tegal* (Skripsi). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Diponegoro
- Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2006. LAKIP Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2006, Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Efendy, Anong Uchjana, 2003, *Ilmu Teori dan Filsafat* , Citra Adhitya Bakti Bandung.
- Ibrahim, Amin, 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.

- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Journal Of Public Policy And Management Review, 8(2), Pp.411-424.
- Laily purnawati(2016) *Evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari taman aloon-aloon kabupaten Tulungagung*.Jurnal Online Mahasiswa. Universitas Tulungagung
- M, taufik Kurniawan. Skripsi. *Evaluasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam rangka Revitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang*. UNNES Semarang
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Taufik(2015) *Evaluasi program relokasi pedagang kaki lima dalam rangka revitalisasi banjir kanal barat (Bkb) kota semarang*(Skripsi). Universitas Diponegoro
- Nabila Kania Tasya, Heru Nurasa, Neneng Weti Isnawaty (2022)*Evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di teras cihampelas kota bandung*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Universitas Padjadjaran
- Nastiti, T. S. (2003). *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuno*. Bandung: 2003 Pustaka Jaya.
- Nelma Netti, Chalid Sahuri(2016) *Evaluasi penataan kawasan terminal simpang air kuning kota bukittinggi* (Tesis). Universitas Riau
- Nidia Fitriani,Muhadjir Darwin(2009) *Evaluasi program relokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) ke pasar klithikan pakuncen kota yogyakarta*.Jurnal Online Mahasiswa. Universitas Gadjah Mada
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sinta Nababan, Theodora M. Katiandagho, dan Oktavianus Porajouw(2021) *Evaluasi program revitalisasi pasar mariat bandar kabupaten Simalungun*.(Skripsi). Fakultas Pertanian. Universitas Sam Ratulangi
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Tejeshwar sing.
- Theodorus G.J. BatlajeriDan Poni Sukaesih(2016) *Evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di kota Bandung*.Jurnal Online Mahasiswa. Universitas Padjadjaran
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mediapress.
- Yuliasari, Indah (2016) *Profil pedagang kaki lima dan evaluasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima di kota surabaya (studi pedagang kaki lima di*

taman bungkul surabaya)(Masters Thesis). Prodi Magister Manajemen Seogijapranata

Sumber lainnya

Badan Pusat Statistika Kabupaten Simalungun “Kecamatan Bandar Dalam Angka 2019”26September2019<https://simalungunkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/> [diakses 02 Februari 2021]

Elka Pangestu, Mari. (2011). Kemendag Bangun 287 Pasar Tradisional.<http://id.beritasatu.com/home-kemendag-bangun-287-pasar-tradisional/2478> di akses 27 April 2017).

Gusman, Irman. (2015). Peran Pasar Sebagai Pondasi Ekonomi Kerakyatan. <http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-kerakyatan> di akses 27 April 2017).

[Http://www.newdamribandung.com/pkl-kuasai-zona-merah](http://www.newdamribandung.com/pkl-kuasai-zona-merah) Diunggah pada 03 November 2014 Pemerintahan Kota Bandung dan Badan Komunikasi dan Informatika.2009. Pemkot Bandung Gelar Operasi Gabungan Penertiban PKL Kawasan 7 Titik. Melalui <http://www.bandung.go.id> <http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/> Diunggah Pada 17 Maret 2015

Ranawati, N. H. (2019). Omzet Pedagang Teras Cihampelas Terus Menurun, Pemkot Upayakan Aktivasi. [AyoBandung.Com. https://ayobandung.com/read/2019/07/21/58334/omzet-pedagang](https://ayobandung.com/read/2019/07/21/58334/omzet-pedagang)